

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Usulkan APBD 2020 Rp 89,44 Triliun

Gambir, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan APBD 2020 mencapai Rp 89,44 triliun atau lebih besar dari APBD-P 2019 mencapai Rp 86,892 triliun.

Angka ini dibahas saat rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI pada Rabu (23/10). Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan nilai tersebut lebih rendah dari yang diusulkan beberapa waktu yang lalu yang mencapai Rp 95,99 triliun.

"Saat dihitung kembali akhirnya direvisi bahwa rancangan KUA-PPAS menjadi Rp 89,441 triliun," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, (23/10). Saefullah mengatakan, penurunan rancangan anggaran sekitar Rp 6 triliun

itu setelah pemerintah daerah memproyeksi adanya penurunan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2019 dari Rp 8,51 triliun menjadi Rp 3,08 triliun. Penurunan rancangan ini juga bagian dari implikasi berkurangnya pos dana perimbangan sebesar Rp 6,39 triliun.

Dengan adanya pengurangan tersebut, maka pendapatan asli daerah (PAD) DKI juga turun sebesar Rp 1 triliun dari Rp 57,71 triliun menjadi Rp 56,71 triliun. Dari empat komponen PAD hanya sektor pajak daerah yang turun, sedangkan tiga komponen lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah tetap sama.

Atas perubahan rancangan ini, lalu menyesuaikan kembali kegiatan-kegiatan belanja. Dia berharap pembahasan rancangan KUA-PPAS tetap

berjalan sambil ada penyesuaian. "Kalau eksekutif dan legislatif sudah sepakat, KUA-PPAS tidak boleh diubah lagi," kata Saefullah

Pangkas TKD

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, M Taufik, menuturkan, penurunan anggaran dalam usulan rancangan KUA-PPAS 2020 itu disebabkan ekonomi nasional yang berdampak penurunan daya beli masyarakat. Artinya, meskipun sektor pajak dinaikkan, namun kenaikan PAD dari pajak tidak akan signifikan.

Taufik menyarankan agar Pemprov DKI memangkas Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (bila ingin meningkatkan anggaran 2020. (faf)